

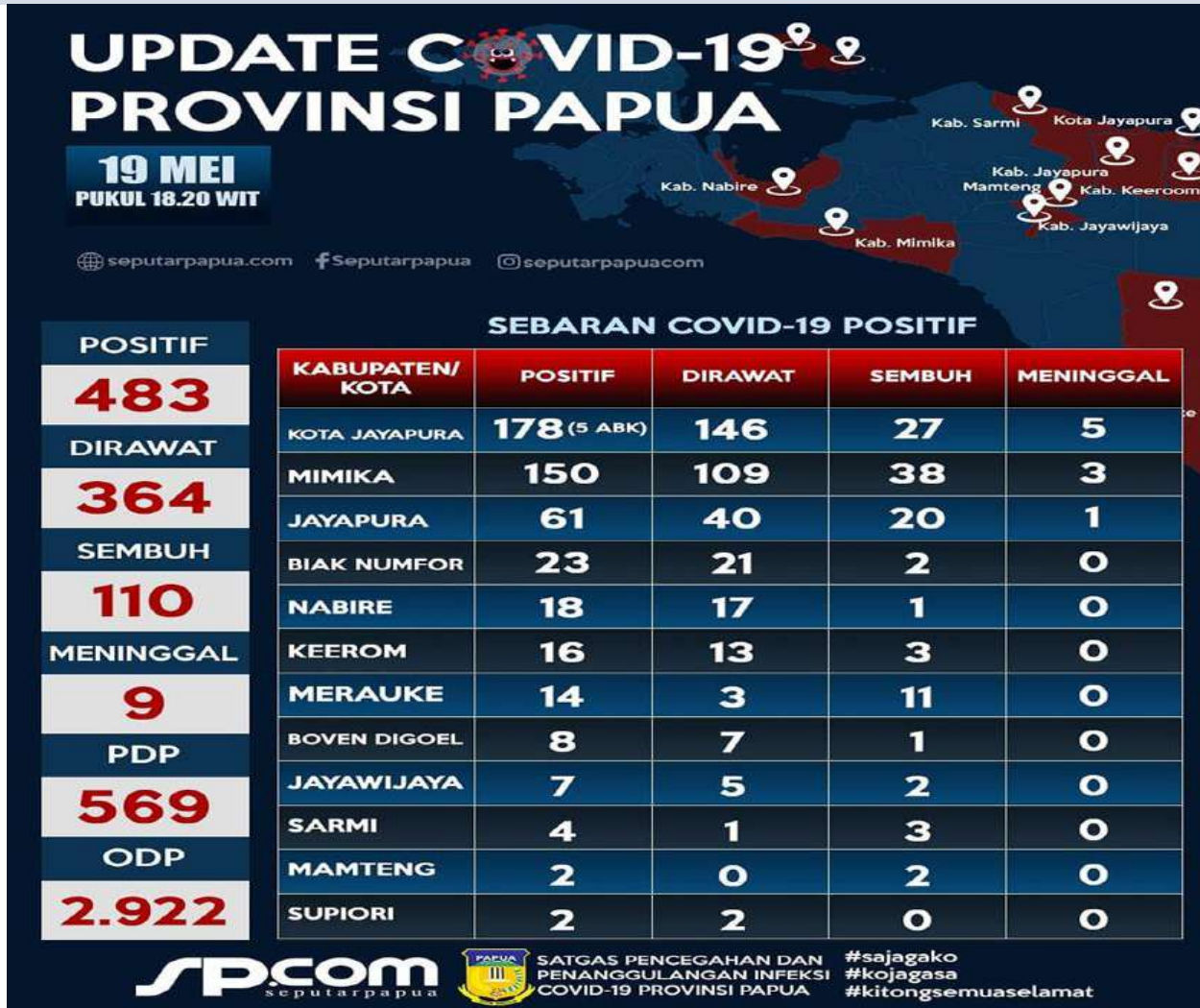
DIALOG ONLINE

DAMPAK SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PENANGANAN KASUS “COVID – 19” DI PAPUA

SESI III,
WILAYAH INDONESIA BAGIAN TIMUR, RABU, 20 MEI 2020

OLEH : MESAK IEK
ISEI CABANG JAYAPURA

Perkembangan Covid-19 Positif sejak 4 -19 Mei 2020



Tanggal	Covid-19 Positif	peningkatan	Di Rawat	sembuh	Meninggal
17 Maret - 4 Mei	240	-	173	60	7
5 - 8 Mei	265	25 (10,42%)	186	72	7
10 Mei	308	43 (16,23%)	228	73	7
12 Mei	321	13 (4,22%)	236	78	7
13 Mei	327	6 (1,87%)	242	78	7
15 Mei	343	16 (4,89%)	245	91	7
17 Mei	436	93 (27,11%)	323	106	7
18 Mei	438	2 (0,46%)	321	110	7
19 Mei	483	45 (10,34%)	364	110	9

- Covid 19 merambat sampai di Papua pertengahan Maret 2020
- pada saat awal Kamis 26 Maret 2020, Pasien Positif Covid-19 : hanya 7 Pasien,
- Rumah Sakit di Prov. Papua : 47 Rumah sakit & Rumah Sakit Rujukan : **16 Rumah Sakit**

Dampak Covid 19 Terhadap Ekonomi Daerah (1)

- Ekonomi Papua triwulan I-2020 dibandingkan triwulan sebelumnya ($q-to-q$) mengalami kontraksi sebesar -6,77 persen atau turun sebesar -6,77 persen.
- Kontraksi pertumbuhan ini disebabkan oleh adanya penurunan produksi pada kategori Pertambangan dan Penggalian (B) yang merupakan kontributor tertinggi ekonomi Papua sebesar -3,89 persen.
- Hal tersebut juga disebabkan hampir semua lapangan usaha mengalami penurunan produksi.
- Sementara dari sisi Pengeluaran, kontraksi pertumbuhan disebabkan oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang turun hingga -71,58 persen.
- Selain kategori Pertambangan dan Penggalian, kategori lain yang mengalami kontraksi pertumbuhan adalah Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar -7,33 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang sebesar -7,51 persen, dan kategori Industri Pengolahan sebesar -4,86 persen.
- **Walaupun demikian, Ekonomi Papua triwulan I-2020 masih mengalami pertumbuhan sebesar 1,48 persen ($y-on-y$).**
- Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dialami oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 5,69 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi disebabkan oleh Komponen Pengeluaran Rumah Tangga sebesar 2,51 persen.

KEJADIAN

- 1) Penutupan perbatasan RI-PNG mulai 25 Jan 2020
- 2) Pembatasan akses orang dari/ke/intra Papua (pembatasan aktivitas bandara, pelabuhan) dan pembatasan aktivitas ekonomi
- 3) Stok bawang nasional minim; isu penutupan impor bawang putih dari Tiongkok
- Awal Feb 2020
- 4) Stok alat kesehatan a.l. masker, antiseptik minim - Awal Mar 2020
- 5) Stok gula minim, Bulog nihil
- 18 Mar 2020

DAMPAK COVID-19 s.d. AWAL APRIL 2020

EKONOMI DAERAH/perbatasa

Pasar Skouw, transaksi Kina PNG (*money changer*), perdagangan antar negara RI-PNG tidak ada selama 5 bulan

- **opportunity lost Rp 4 M/bln; 109 usaha, ± 500 orng menjadi TPT, menurun Jasa Keuangan dan Perdagangan**

a. Transportasi - **oppportunity lost Rp385M/bln**

b. Makan minum - **menurun 50%**

c. Akomodasi - **occupancy rate 70% → Mar 2020 37% →**

Pembatasan akses 5-10%

d. **Pertambangan*** - **belum ada eskpor hingga sekarang 2020**

INFLASI

a. Peningkatan harga **bawang putih 26,41%** dan **bawang merah 13,64%** dalam 5 hari (5-10 Feb 2020)

b. Kelompok komoditas kesehatan beserta gula pasir dan telur ayam masuk dalam **kelompok inti yang diperkirakan inflasi** pada Maret 2020

c. **Harga telur ayam naik 17,7% (25/03); Beras 17,0%, Sapi 21,6%, Cabai Merah 32,8%; Cabai Rawit 74,4% (26/03).** Kemudian mengalami normalisasi pada (27/03) dengan tren yang tetap meningkat

Dampak KE DEPAN

- 1) COVID-19 masih berdampak hingga 9 bulan ke depan
- 2) Larangan mudik d.r. Idul Fitri
- 3) Penundaan PESPRAWI & PON - XX
- 4) Permintaan turun (Perdagangan, Akmamin, Transport)

PDRB Papua
±Rp3,2 T

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Papua 2020
2,0 - 2,4%

Inflasi Provinsi Papua 2020

Mar	Apr	Des
-0,92%	0,52%	1,81%
1,21%	2,06%	4,07%

Dampak terhadap Pengangguran (3)

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Papua Februari 2020 sebesar 66.296 orang atau meningkat 7,13 % dibanding Februari 2019 hanya 61.885 orang (meningkat 4.411 orang)
- Data TK di Sektor Informal belum terdata dan bekerja secara of-line, dan sejak 18 Mei 2020, bekerja dari 06,00 s/d 14.00 wit (diberlakukan PSBB)

Dampak terhadap Perhotelan (4)

- Mei 2019 Realisasi (PAD) Kota Jayapura, terealisasi sebesar 36.88 persen atau sebesar 71.930.705.000 dari target,
- kontribusi yang paling besar, dari Pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran, pajak hiburan, THM dan beberapa objek pajak
- Namun sampai mei 2020 sekitar 63 unit hotel di Jayapura ditutup, semua karyawan di rumahkan

Pariwisata

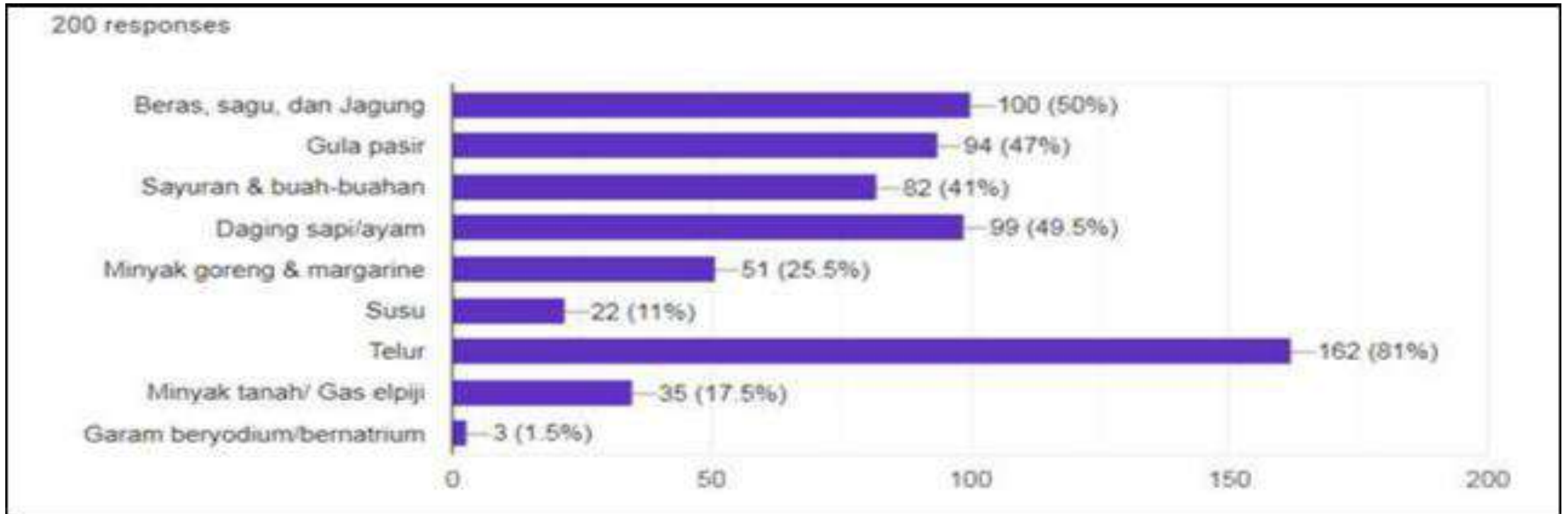
Terjadi penurunan jumlah wisman terutama yang berasal dari Papua Nugini sehubungan dengan ditutupnya pos lintas batas di perbatasan Skouw. Demikian pula halnya dengan penurunan jumlah wisnus karena ditutupnya akses masuk ke Papua dengan menurunnya pergerakan penumpang dari Udara dan Laut. Hal tersebut berdampak pada penurunan tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di Papua. Pemerintah Kota Jayapura sendiri telah mengeluarkan surat edaran menutup tempat-tempat wisata, salon, spa & hiburan malam.

	Kunjungan Jalur Darat	Kunjungan Jalur Udara	TPK
Jan-2020	5.467 orang -8,36% (mtm)	177.800/bln (2019)	41,14 % -14,9% (mtm)
Feb-2020*	0	-60% (yoy) 70.000/bulan	36,8 – 37,2 %
Mar-2020*	0	-70% (yoy) 55.000/bulan	10,5 -15,5 %

Dampak terhadap Perkembangan Inflasi (5)

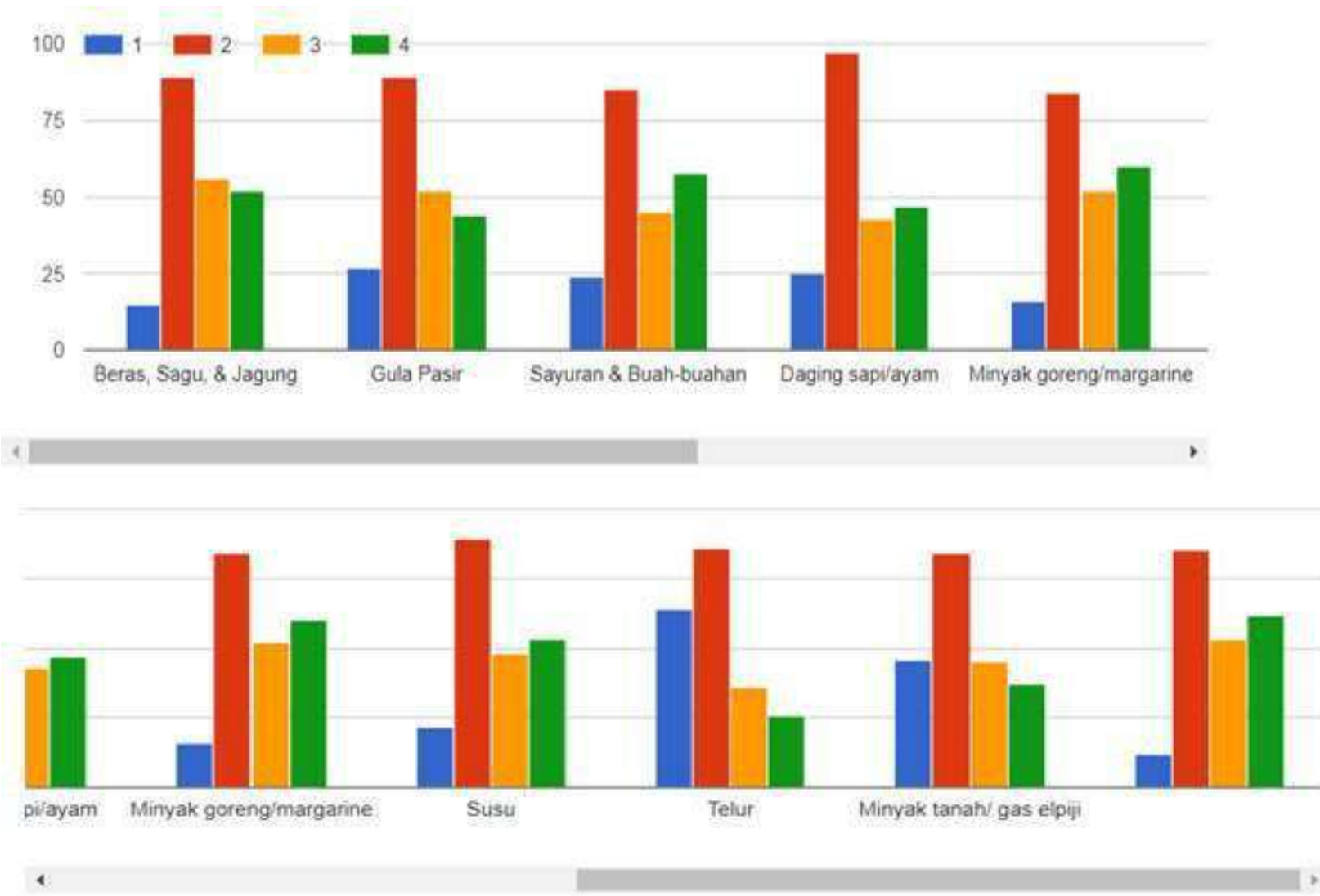
- Pada Januari 2020 gabungan 3 kota (Merakuke, Timika dan Jayapura) IHK di Papua mengalami inflasi sebesar 0,42 persen. karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
- Pada Bulan Maret 2020 gabungan 3 kota IHK di Papua tercatat mengalami deflasi 0,92 persen atau terjadi penurunan angka Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,22 pada Februari 2020 menjadi 103,26 pada Maret 2020.
- Deflasi gabungan 3 kota IHK di Papua sebesar 0,92 persen terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh penurunan indeks pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok kesehatan; kelompok transportasi; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan.
- Inflasi tahun kalender gabungan 3 kota IHK di Papua pada Maret 2020 sebesar 0,09 persen dan inflasi year on year (Maret 2020 terhadap Maret 2019) sebesar 1,21 persen.

Hasil Survey harga sembilan bahan pokok yang mengalami kenaikan harga



Dari hasil survey ini responden menyatakan bahwa terjadi kenaikan harga pada telur, daging/ayam, beras, sagu, jagung, gula pasir, sayura, buah2an, minyak goreng, susu, m. tanah. Meskipun demikian, masyarakat terlayani dengan baik, namun sekelompok masyarakat (16.3%) yang merasa tidak terlayani

Respon masyarakat terhadap ketersediaan 9 bahan pokok



skala Linkert :

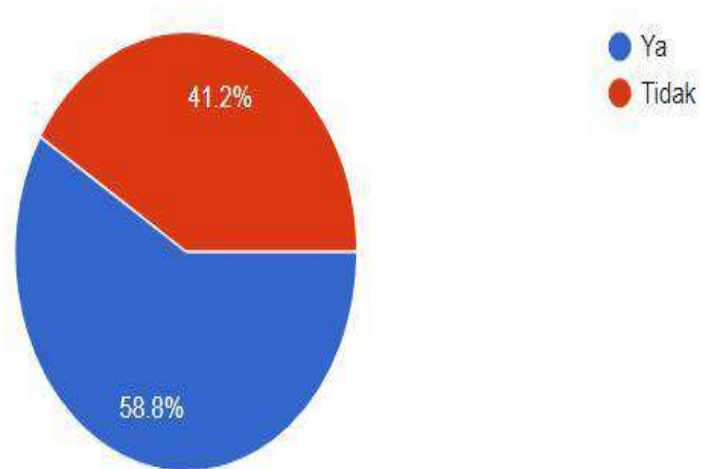
1=sangat sulit didapat (**warna biru**),
2=sulit (**warna merah**),
3=mudah (**warna orange**),
4=sangat mudah didapat (**warna hijau**)
diberikan sebagai berikut,

Guna menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat agar tetap berjalan secara optimal, maka pemerintah perlu mengontrol harga bahan pokok secara rutin, perlu pembentukan **satgas ekonomi masyarakat yang mengontrol harga pasar** sembilan bahan pokok sampai pada proses supply dan distribusinya.

Respon Responden tentang Pemanfatan pekarangan

Apakah lingkungan tempat tinggal saudara memiliki pekarangan untuk ditanami?

211 responses



- Sebanyak 58,8% responden menyatakan bahwa dapat mengembangkan pekarangan utk menanam berbagai macam jenis tanaman sebagai suplay dalam mendukung kebutuhan di masa pandei Covid ini.
- Tanaman yang dikembangkan di pekarangan antara lain : sayur, buah, bumbu dan tanaman obat.
- **Ada venomena baru bahwa akibat Covid-19 di seluruh Papua rata-rata OAP & Non OAP turun ke ladang mengolah lahan yang selama ditinggalkan karena lebih mengkonsumsi nasi dan lainnya**

Dampak Covid 19 terhadap Pendidikan

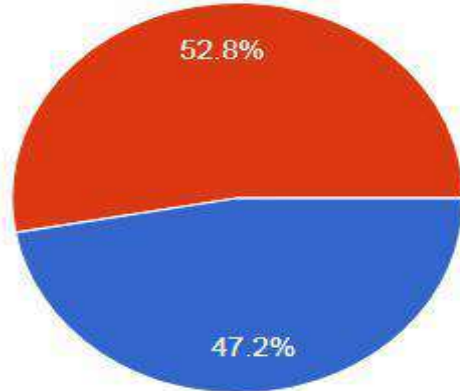
Status tempat tinggal anda saat ini?

Media pembelajaran berbasis On-Line (sistem Daring I)

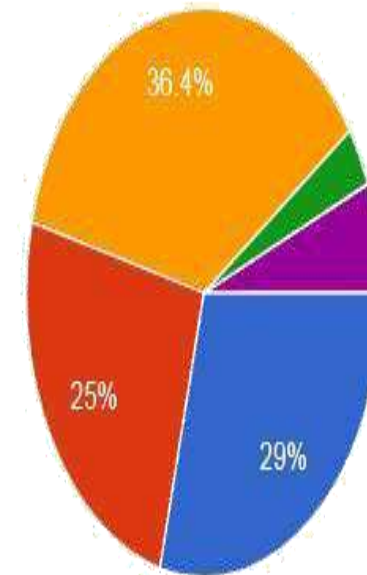
178 responses

Apakah anda seorang mahasiswa/pelajar?

212 responses



● Ya
● Bukan

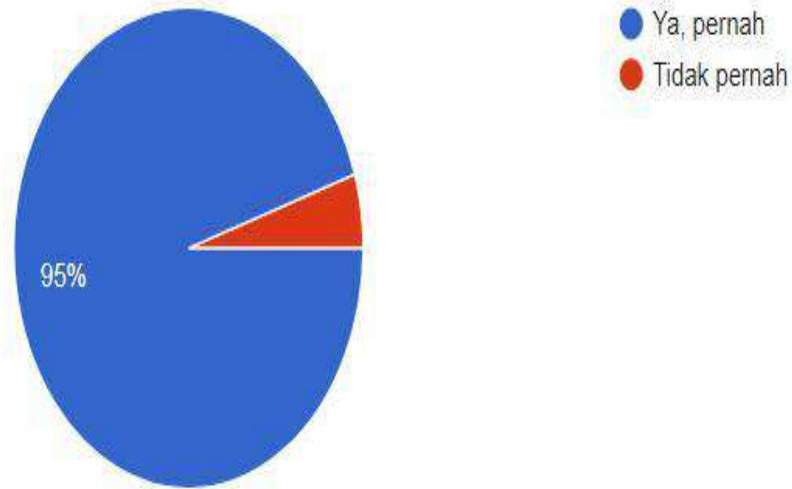


● Rumah orang tua
● Rumah keluarga/famili
● Rumah sewa/Kos
● Asrama
● Lain-nya (misal gubuk)

- Total partisipan dalam survei sekitar 52,8% bukan pelajar. Sedangkan 47,2 sebagai siswa, pelajar dan mahasiswa
- Tempat tinggal, sekitar 29% tinggal dgn orang tua, sekitar 25% tinggal di rumah keluarga mereka. 36,4 % tinggal di kost/sewa dan selebihnya dari responden bertempat tinggal asrama dan rumah tinggal lainnya

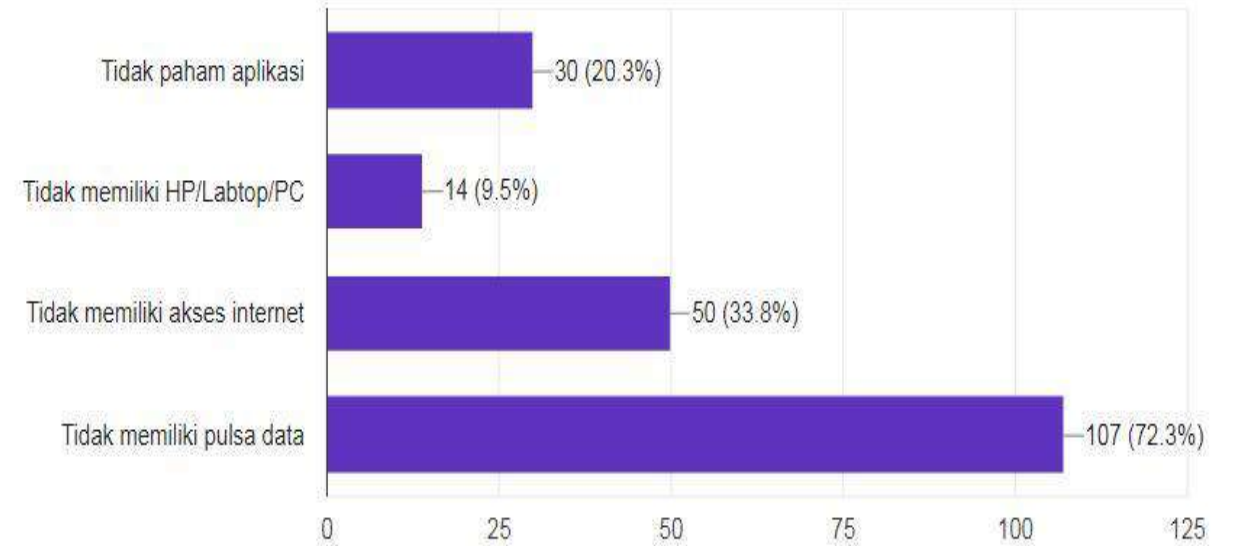
Apakah anda pernah belajar menggunakan fasilitas internet?

181 responses



Kendala utama dalam belajar sistem daring atau online?

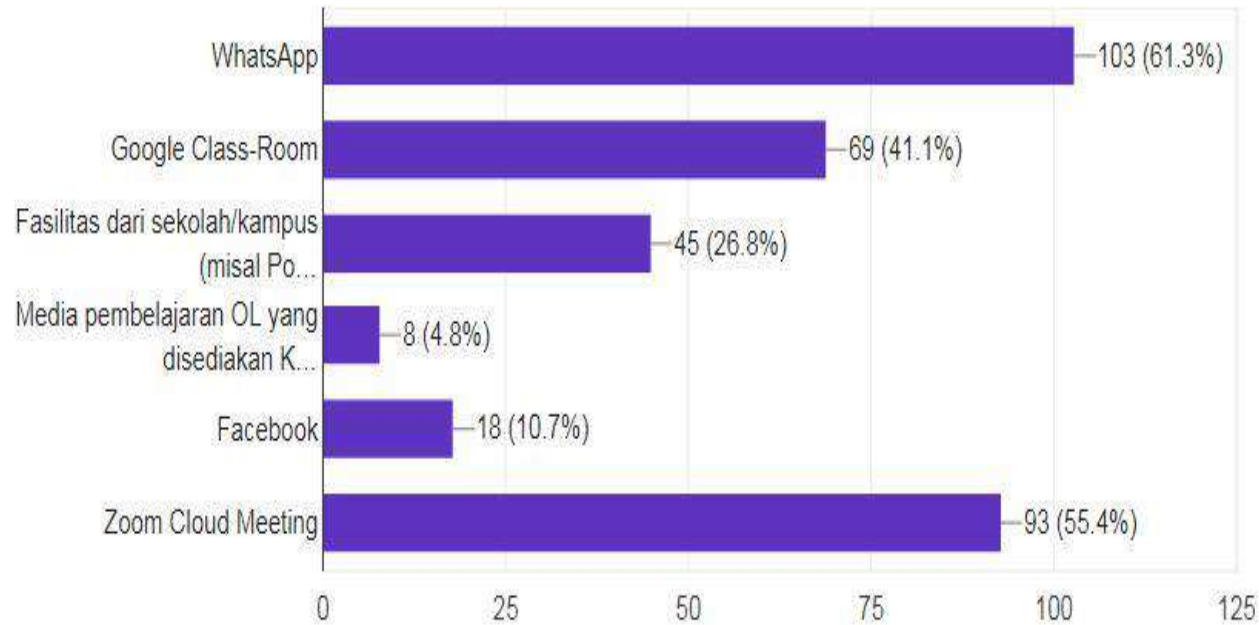
148 responses



- Sekitar 95% responden dari 181 responden menyatakan menggunakan fasilitas internet untuk belajar/mengajar di pandemic Covid 19 ini.
- Sisanya sebesar 5% menyatakan “tidak pernah”
- Kendala yang dihadapi siswa/mahasiswa adalah tidak memiliki pulsa data dan tidak ada akses internet

Media pembelajaran berbasis online atau sistem daring apa yang pernah digunakan?

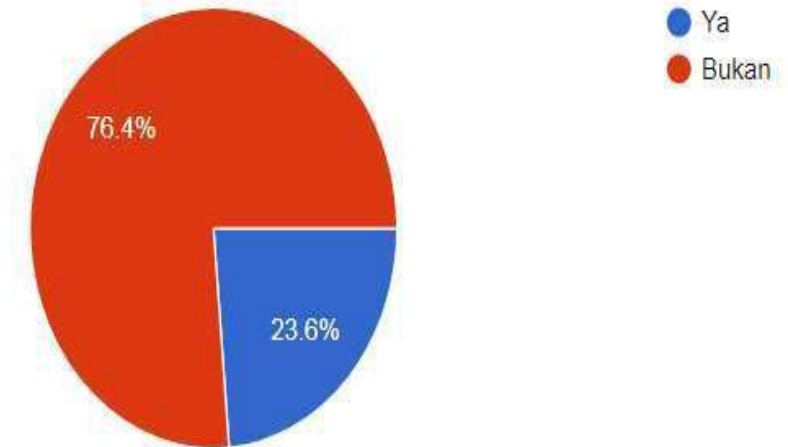
168 responses



Media pembelajaran berbasis On-Line (sistem Daring)

Apakah anda seorang guru/dosen?

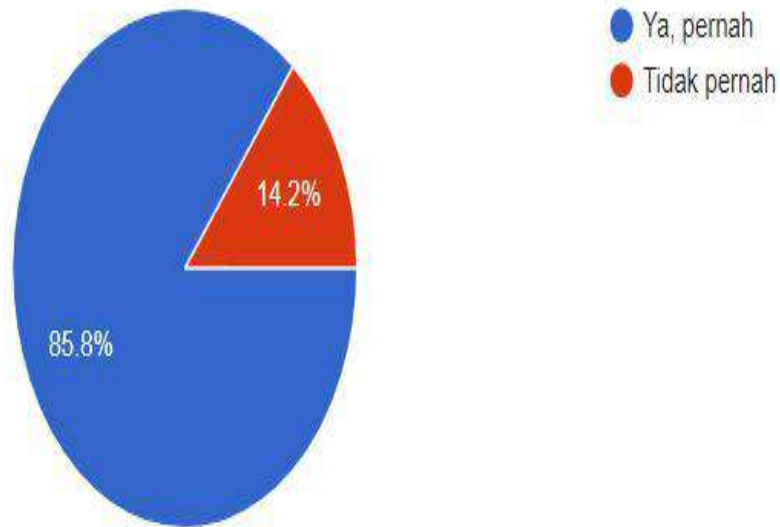
203 responses



Media Pembelajaran yang sering digunakan dlm proses pembelajaran 61,3 % menggunakan WhatsApp dan 55,4% menggunakan zoom, sisanya menggunakan lainnya Responden yang berhasil menjawab kuisisioner dari kalangan guru/dosen hanya 23,6%

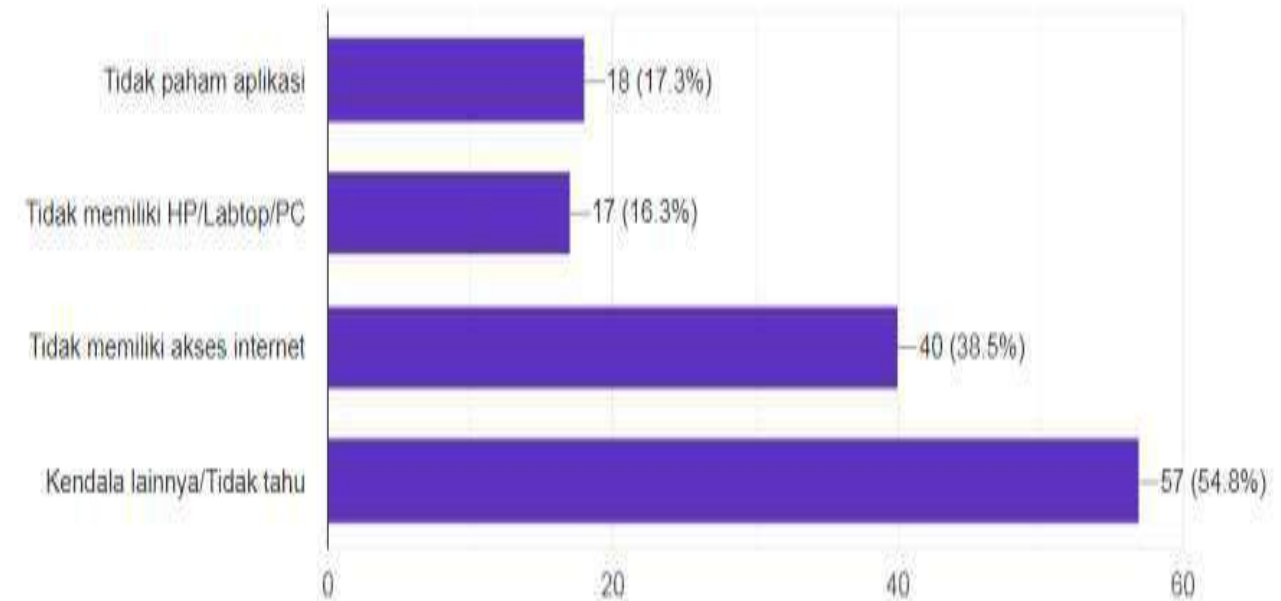
Apakah anda pernah menggunakan fasilitas internet sebagai media pembelajaran?

134 responses



Kendala utama dalam menerapkan media pembelajaran secara daring atau online?

104 responses



- Dari 23,4% responden adalah guru/dosen, tidak pernah menggunakan vasilitas internet sebagai media pembelajaran
- Kendala yang dihadapi guru/dosen : tidak tahu atau lainnya dan tdk memiliki akses internet.
- Ada mhs yang mengacam dosen agar segera menghentikan proses belajar mengajar melalui media online, karena mereka terkendala dengan HP atau Laptop serta pulsa data

Dampak pada Keberlanjutan Pendidikan (7)

- Jika pandemi Covid-19 tidak segera diputuskan, akan berdampak pada Perguruan Tinggi satker seperti UNCEN, PTS-PTS yang ada di Papua maupun Papua Barat.
- Mhs kesulitan untuk membayar SPP, bahkan calon mhs baru akan berkurang krn orang tua siswa kesulitan biaya

RESPON PEMERINTAH PROVINSI

- Pemprov Papua telah mengalokasikan dana sebesar kurang lebih Rp 312 miliar untuk penanganan Covid-19, perubahan APBD Provinsi sama persis dengan apa yang disampaikan oleh pak Anggito saat pembukaan dialog ini 8 Mei 2020 lalu.
- Pemprov Papua Barat mengalokasikan dana Rp 197,8 miliar dalam bentuk bahan batuan pangan seperti beras, gula, minyak goreng.
- Pemerintah Provinsi Papua telah mengalokasikan dan menyalurkan dana kepada 29 kabupaten/kota untuk penanganan Covid 19.

➤ Surat Edaran Gubernur TENTANG PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN COVID'19 DI PROVINSI PAPUA

- Sejak 17 Maret 2020 pemda Provinsi Papua telah mengeluarkan surat edaran tentang pencegahan Corona Virus Disease (Covid 19) untuk melakukan Community Quarantine selama 18 – 31 Maret 2020
- Selanjutnya diperpanjang tanggal 1- 17 April 2020 dan
- Diperpanjang sejak 20 April hingga 8 Mei 2020
- Diperpanjang sejak 8 – 29 Mei 2020
- SURAT PERNYATAAN GUBERNUR NO. 440/4168/SET/2020, tentang peningkatan status siaga darurat Pengendalian Covid 19 Provinsi Papua menjadi “Status tanggap Darurat Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Prov Papua
- Surat Edaran No. 440/4170/SET, Tanggal 09 April 2020, Tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Covid 19 di Provinsi Papua
- Surat Pernyataan Gub. Papua No. 440/4168/SET/2020, tentang peningkatan **Status Siaga Darurat** Pengendalian Covid 19, menjadi **Status tanggap darurat** Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19 di Prov. Papua
- Surat Edaran No. 440/4637/set, Tanggal 22 April 2020 Tentang pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Covid 19 di Provinsi Papua
- Surat Edaran No. 440/4770/SET, Tanggal 24 April 2020 Tentang Petunjuk Teknis Keluar Masuk Orang yang dikecualikan karena alasan Dinas yang bersifat Penting dan Mendesak.
- **SURAT PERNYATAAN GUBERNUR NO. 440/5169/SET/2020, tertanggal 05 Mei 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, selama 28 hari, terhitung mulai 7 Mei s/d 4 Juni 2020.**

Sekarang dan Pasca COVID-19, RAKYAT JANGAN LAPAR

- Pada tanggal 22 April 2020, PBB memperingatkan bahwa sangat mungkin terjadi kelaparan yang hebat di dunia akibat Covid-19.
- Di Indonesia Rezim ganti rezim, presiden ganti presiden, swasembada beras Indonesia timbul tenggelam.
- Hal ini terjadi karena alih fungsi lahan yang sangat luar biasa baik di pulau Jawa sebagai gudang pangan bagi Rakyat Indonesia, tetapi juga di luar Jawa, termasuk Papua terjadi alih fungsi dusun sugu untuk pembangunan di era otonomi daerah yang luar biasa, kondisi ini sangat mempengaruhi ketersediaan pangan lokal saat covid ini maupun pasca pandemi covid.
- **Kebijakan pembangunan selama ini membuat semua daerah tergantung ke pulau Jawa terutama beras (nasi), dengan meninggalkan pangan lokal**
- Apabila tidak dilakukan antisipasi dengan bijak, maka akan ada 2,47 juta orang di Tanah Papua yang berpotensi kelaparan pasca Covid-19. Sebanyak 1,75 juta jiwa di Provinsi Papua dan 719 ribu jiwa di Provinsi Papua Barat.
- Saat ini total produksi beras di Provinsi Papua (2019) adalah 133.684 ton. Sebanyak 91% berasal dari Kabupaten Merauke. Produksi beras di Papua hanya 9.045 ton.
- Angka-angka di atas ini menunjukkan, bahwa kita harus siap-siap pindah ke pangan lokal kalau kita tidak mau kelaparan beberapa bulan ke depan.
- Jika pandemic Covid-19 ini terus berkecamuk, dan beras dari pulau Jawa dan Vietnam sudah tidak ada lagi, maka kita harus mempersiapkan diri untuk beralih ke makanan lokal seperti : ubi jalar, ubi kayu, keladi, talas, sukun, pisang, atau labu sebagai substitusi beras.

Himbauan pemerintah pusat untuk melaksanakan pembatasan sosial dan kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan skema work from home sebagai upaya pencegahan Covid-19 memerlukan dukungan ketahanan pangan provinsi Papua. Berdasarkan hasil liason kepada perusahaan retail modern, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penurunan omset penjualan harian. Selain itu, stok bahan pangan dapat memenuhi kebutuhan hingga 3 bulan kedepan. Data dari Bulog memberikan gambaran bahwa stok komoditas beras cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 3,4 bulan dan stok gula pasir yang menipis akan mulai didistribusikan ke Papua pada akhir bulan April 2020

Stok Gula Pasir Menipis

Stok gula pasir habis dikarenakan masa tunggu panen tebu yang belum siap serta peningkatan permintaan

Pengolahan bahan dasar gula pasir impor melalui pabrik gula di Jawa

Distribusi gula pasir oleh Bulog di Papua diperkirakan akhir April 2020



Pasar Modern



Penurunan omset penjualan harian hingga 5-10% paska kebijakan *work from home* dan pembatasan sosial

1

Stok mencukupi hingga 2-3 bulan

2

Tidak ada rencana pengurangan pegawai

Stok Ketahanan Pangan Beras Non Komersil Provinsi Papua (per wilayah)



Rekomendasi (1)

- Sejak pertengahan Maret 2020 sampai hari ini, sertiap hari ditemukan pasien positif Covid-19, dan penularan terjadi secara internal di setiap kota bahkan ditingkat Kelurahan, RW/RT, walaupun pemerintah telah menerapkan kebijakan **lockdown**, **Social Distancing**, pelarangan pesawat dan kapal laut masuk-keluar Papua serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (**PSBB**), **oleh karena itu, saat ini perlu pengawasan yang ketaat oleh pemerintah daerah khusus kabupaten/kota yang berpotensi meningkatkan penyebaran Covid'19 ini.**
- **Sangat perlu “koordinasi” yang harmonis antar pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota untuk membuat program dan kegiatan yang antar wilayah, dan perlu membuang ego masing-masing, krn penyebaran corona virus ini tidak mengenal batas wilayah**
- Satgas Pengendalian, Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di tingkat kabupaten/kota wajib mensosialisasikan kedisiplinan masyarakat secara terus menerus, karena tingkat kedisiplinan masyarakat kita sangat rendah.

Rekomendasi (2)

- Perlu pendataan yang baik tentang masyarakat yang layak menerima bantuan bama, sehingga akan terhindar dari pendobolan penerima, karena saat ini ada sebagian masyarakat belum terlayani secara baik.
- perlu pembentukan **satgas ekonomi masyarakat yang mengontrol penyaluran bama serta mengontrol harga-harga** sembilan bahan pokok sampai pada proses supply dan distribusinya.
- Perlu ada kebijakan Riil yang dapat menyentuh Masyarakat yang saat ini kehilangan mata pencaharian, hal ini akan meningkatkan daya beli masyarakat utk bertahan hidup di saat pandemi ini.
- Lembaga pendidikan terutama perguruan tinggi perlu menyiapkan salah satu media belajar online yang mudah untuk digunakan oleh guru/dosen dalam proses pembelajaran, selanjutnya lembaga pendidikan maupun pemerintah perlu mempersiapkan jaringan internet gratis yang memadai pada area-area tertentu yang mudah diakses oleh pelajar dan mahasiswa.
- Perlu ada kebijakan khusus bagi pelajar/mahasiswa yang terkendala dengan belajar melalui media online.

Rekomendasi (3)

- Pemerintah pusat maupun daerah perlu mendorong dengan kebijakan anggaran guna mengembangkan konsep ketahanan dan kedaulatan pangan dengan melibatkan masyarakat di kampung-kampung mengembangkan komoditi local sesuai potensi masing-masing wilayah seperti : sagu, jagung, keladi, petatas, singkong; padi, Tanaman sayuran: kangkung, gedi, sawi, bayam; tanaman penghasil bumbu seperti: srei, jahe, tomat, ricak, bawang, lengkuas, kunyit; Tanaman buah-buahan: pepaya, pisang, jambu batu, nanas, belimbing dan sebagainya, hal ini diharapkan akan mengurangi ketergantungan masyarakat pada beras Raskin.
- Pemerintah Kabupaten dan Kota perlu melakukan pengawasan terhadap perencanaan penggunaan dana kampung di bidang ekonomi secara baik untuk pengembangan potensi ekonomi kampung.

Sekian dan terima kasih